

**MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL
REPORTING PADA PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA DAN MALAYSIA**

Peni Nugraheni

Rahma Dwi Yuliani

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

peninugraheni@yahoo.com

Abstrak

The high growth of the Islamic financial institution raises the question of the extent of their social responsibility towards the environment. Especially Islamic values attached to these institutions provide the demand to further contribute to the life of the community. This study aims at analyzing the influence of corporate governance mechanism toward Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure in Islamic banking in Indonesia and Malaysia. These two countries have Muslim majority population and the high growth of Islamic financial institutions development. ISR disclosure is important to perform the accountability of Islamic bank to the accordance of Islamic principles and the environment. The paper uses corporate governance mechanism as factor to evaluate its influence toward ISR disclosure. The population in this study is all Islamic banks in Indonesia and Malaysia, which publish the annual report from 2012 to 2014. The research sample includes 33 data from 11 Islamic banks in Indonesia and 39 data from 13 Islamic banks in Malaysia. The technique that used in this study is panel regression with random effect model.

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

Based on the analysis, the research finds that only the number of member and meeting of nomination and remuneration committee affect positively toward ISR disclosure, while the dual position and number of meeting of sharia supervisory board, the institutional and foreign ownership do not have influence toward ISR disclosure.

Keywords: *Islamic Social Reporting, Islamic bank, corporate governance mechanism*

Abstract

Perkembangan lembaga keuangan syariah memunculkan pertanyaan sejauh mana tanggung jawab social mereka terhadap lingkungan. Nilai-nilai Islam yang melekat pada lembaga ini memberikan tuntutan sejauh mana kontribusi mereka pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan Islamic social reporting (ISR) dalam perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini memiliki penduduk mayoritas Muslim dan pertumbuhan lembaga keuangan Islam yang cukup pesat. Pengungkapan ISR merupakan hal yang penting untuk menilai akuntabilitas bank syariah terhadap kesesuaiannya dengan syariah dan terhadap lingkungan

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang memenuhi kriteria menerbitkan laporan tahunan dari 2012 hingga 2014. Sampel penelitian meliputi 33 data dari 11 bank syariah di Indonesia dan 39 data dari 13 bank syariah di Malaysia. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan regresi panel dengan efek acak. Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menemukan bahwa hanya jumlah anggota dan jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sementara rangkap jabatan dan jumlah anggota DPS, kepemilikan institusional dan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Kata kunci: *Islamic Social Reporting, bank syariah, corporate governance mechanism*

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan, terutama di negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Perkembangan perbankan syariah tidak hanya tampak dari peningkatan dari jumlah perbankannya saja, tetapi juga jumlah nasabah dimana semakin banyak masyarakat Muslim yang juga menginginkan transaksi ekonominya sesuai dengan syariah. Namun demikian, prospek yang bagus ini juga seiring dengan permintaan masyarakat terhadap perbankan syariah untuk semakin menunjukkan identitas Islam suatu organisasi, termasuk diantaranya adalah keterlibatan perbankan syariah dalam kegiatan social dan lingkungan masyarakat sekitar yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pengungkapan CSR sangat penting bagi suatu organisasi bisnis syariah. Hameed et al (2003) menyatakan bahwa kegiatan CSR menunjukkan keberhasilan organisasi menyeimbangkan antara kinerja keuangan dan kinerja social dan dapat menunjukkan bahwa kegiatan organisasi tidak memiliki dampak yang merugikan

bagi masyarakat. Selain itu, CSR akan meningkatkan keyakinan stakeholder terhadap kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Terkait dengan adanya tuntutan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, *Islamic Social Reporting* telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan. *Islamic Social Reporting* merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang telah disisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Indeks ISR diyakini dapat menjadi panduan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam (Fitria dan Hartanti, 2010). Manfaat dari pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (IAEI, 2015),

Meskipun keterlibatan suatu organisasi dalam kegiatan CSR sudah menjadi kewajiban yang disyaratkan pemerintah, tetapi setiap perusahaan memiliki berbagai tingkatan dalam kuantitas dan kualitas pengungkapan item CSR (Nugraheni dan Anuar, 2014). Hal ini dikarenakan banyak faktor

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan suatu informasi, salah satunya adalah penerapan corporate governance. Corporate Governance (CG) dinilai dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR suatu organisasi. Adanya organ-organ perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite renumerasi dan nominasi) merupakan penerapan dari CG yang dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan prinsip transparansi dan accountabilitas, termasuk dalam pengungkapan CSR. Dalam lembaga keuangan syariah, keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) juga ikut mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Bukair dan Rahman, 2015). Oleh karena itu, masalah penelitian di bahas dalam penelitian ini adalah: pertama, sejauh mana pengungkapan ISR telah dilakukan oleh bank syariah? Kedua, bagaimana mekanisme corporate governance mempengaruhi pengungkapan ISR di bank syariah?

Terkait dengan DPS, Penelitian Adiartanto dan Chariri (2013) menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sebaliknya penelitian Rahayu dan Cahyati (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat dewan pengawas

syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Apabila anggota DPS dipandang dari jumlah bank yang menjadi tanggung jawabnya, maka rangkap jabatan DPS juga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Penelitian Usamah (2010) menyatakan bahwa rangkap jabatan anggota DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan sementara Penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) menunjukkan hasil bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid bank syariah.

Keberadaan dewan komite, misalnya komite renumerasi dan nominasi (KRN) juga diduga dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perbankan syariah. Penelitian ini mencoba melihat hubungan antara banyaknya anggota dalam komite dan jumlah rapat yang dilakukan oleh KRN terhadap pengungkapan ISR yang dilakukan perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah komponen corporate governance yaitu dewan pengawas syariah, komite renumerasi dan nominasi dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh bank

syariah. Sebagai suatu lembaga keuangan syariah, masyarakat memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap lembaga ini, tidak hanya dari sisi kinerja keuangan, tetapi juga bagaimana penerapan prinsip Islam diterapkan dalam kegiatan operasional mereka. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam laporan tahunan maupun pengungkapan CSR yang dipublikasikan perusahaan.

Penelitian ini mencoba tidak hanya menguji pengaruh factor-faktor corporate governance terhadap pengungkapan ISR di bank syariah di Indonesia tetapi juga bank syariah di Malaysia. Sebagai sesama negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, perkembangan industri keuangan syariah juga sangat pesat sehingga mengetahui pengungkapan ISR di kedua negara ini sangat bermanfaat untuk menilai sejauh mana perbankan syariah memberikan informasi kepada stakeholder terkait kegiatan perbankan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut: pertama, sejauh mana pengungkapan ISR telah dilakukan oleh perbankan syariah di dua negara. Kedua, penggunaan indeks ISR menggunakan AAOIFI indeks diharapkan dapat meningkatkan daya banding pada hasil penelitian antara

Indonesia dan Malaysia karena AAOIFI merupakan organisasi non-profit Internasional yang pertama menyusun standar akuntansi syariah. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menggali komponen corporate governance yang jarang digunakan yaitu komite renumerasi dan nominasi. Sebagai salah satu organ CG, dipandang penting juga untuk melihat pengaruh komite ini terhadap luas pengungkapan ISR yang dilakukan perbankan.

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu perusahaan melakukan aktivitas di tengah masyarakat melalui kontrak sosial dimana kegiatan perusahaan diharapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Guthrie dan Parker, 1989). Perusahaan berusaha agar setiap kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungannya. Pengungkapan CSR merupakan upaya perusahaan untuk menginformasikan kegiatannya sehingga masyarakat atau stakeholder dapat menilai kegiatan social perusahaan dan memberikan legitimasi kepada

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

perusahaan.

penelitian ini.

Perbankan syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah memiliki dua peran utama yaitu di bidang ekonomi dan social politik (Farouk et.al, 2011). Oleh karena itu, bagaimana kontribusi bank syariah kepada lingkungan sekitarnya juga menjadi indikasi factor keadilan yang dijalankan pihak perbankan. Bank Indonesia selaku regulator sangat mendorong peran bank syariah di masyarakat dengan dilandasi keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa 'maslahat' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (IAEI, 2012). Karakteristik bank syariah juga dapat dilihat dari pengungkapan yang dilakukan sebagai identitas organisasi Islam (Rahman dan Saimi, 2015). Pengungkapan CSR menunjukkan bagaimana perbankan mengelola sumber daya yang dapat bermanfaat untuk lingkungan dan sebagai bukti akuntabilitas kepada Allah SWT yang telah menciptakan sumber daya tersebut (El-halaby dan Hussainny, 2015). Indeks CSR yang sesuai dengan karakteristik bank syariah diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang membagi komponen CSR menjadi 76 item pengungkapan yang digunakan dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Penerapan corporate governance di perbankan syariah melalui organ-organnya akan membantu bank syariah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Farook et.al, 2011), termasuk dalam menjaga kesesuaian kegiatan pihak bank dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) memiliki peran penting dan membedakan entitas bisnis Islam dengan entitas yang lain.

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang berfungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi jalannya kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI, 2009). Penelitian ini mencoba menguji pengaruh dewan pengawas syariah terhadap

Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani

Pengungkapan ISR dilihat dari rangkap jabatan anggota DPS dan jumlah rapat yang diadakan DPS. Menurut Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009, DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain (pasal 50). Usamah (2010) menyatakan bahwa untuk menjaga kualitas pengawasan pemenuhan prinsip syariah di bank syariah diperlukan adanya pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan DPS yang bertujuan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus dan profesional. Pelaksanaan GCG diharapkan akan mempengaruhi perusahaan dalam aspek transparansi, diantaranya adalah pengungkapan ISR terhadap stakeholder. Sehingga DPS dengan rangkap jabatan yang sedikit akan memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap lingkup pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian Usamah (2010) menyebutkan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan berbasis bagi hasil. Berbeda dengan Penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) yang menunjukkan hasil bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid bank syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{1a} : Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{1b} : Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

Menurut Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009, DPS wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam satu bulan (pasal 49 ayat 1). Semakin intensif DPS mengadakan rapat, semakin banyak kebijakan manajemen maupun kegiatan perusahaan yang dapat dibahas DPS dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek syariah, termasuk dalam pengungkapan informasi yang semakin luas. Adiertatnto dan Chariri (2013) menyatakan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{2a} : Jumlah rapat dewan pen-

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

gawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{2b}: Jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

Definisi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 (pasal 1 poin 1) adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris (DK) dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas DK terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota dewan direksi dan komisaris. Poin 2 menjelaskan pengertian nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris, dan remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota direksi dan anggota dewan komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (poin 3). Fungsi KRN adalah memberikan

rekomendasi kepada DK terkait kebijakan evaluasi kinerja bagi direksi dan atau anggota DK.

Jumlah anggota KRN sedikitnya terdiri dari 2 orang yang berasal dari komisaris independen dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya. Semakin banyak jumlah anggota KRN, diharapkan kinerja komite semakin baik, termasuk mendorong kinerja direksi dalam berkontribusi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat dan pengungkapan informasi kegiatan perbankan. Penggunaan variable KRN dalam penelitian belum begitu banyak dilakukan, namun penelitian Murwaningsari (2009) tidak menemukan pengaruh antara komite KNR dan kinerja perusahaan.

Namun demikian, berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{3a}: Jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{3b}: Jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap

Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani

pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

Jumlah Rapat Anggota KRN di Indonesia dibahas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/Pojk.04/2014 pada Bab IV pasal 12 Tentang Penyelenggaraan Rapat yaitu Rapat KRN diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dilihat dari manfaatnya, diharapkan semakin sering kegiatan rapat dilakukan, pembahasan kinerja manajemen juga akan semakin intensif dibicarakan sehingga kebijakan perbankan yang terkait dengan kepentingan stakeholder, termasuk pengungkapan ISR juga menjadi perhatian KRN. Penelitian Widyani (2015) menyatakan bahwa jumlah rapat KRN berpengaruh negative terhadap kinerja bank. Penelitian tentang keterlibatan komite remunerasi dan nominasi terhadap pengungkapan ISR belum banyak dilakukan, meskipun demikian, dengan asumsi pola yang sama, bahwa semakin sering rapat dilaksanakan, maka semakin bagus pengawasan terhadap pengungkapan ISR yang dilakukan perusahaan sehingga pengungkapan akan semakin luas.

Berdasarkan penjelasan

yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{4a} : Jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{4b} : Jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

Struktur kepemilikan yang berbeda dimungkinkan juga memberikan pengawasan yang berbeda terhadap kinerja perusahaan, termasuk kewajiban mengungkapkan informasi kepada stakeholder. Semakin banyak pihak stakeholder yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan, maka perusahaan akan semakin banyak dan detail dalam mengungkapkan informasi tersebut. Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

Kepemilikan saham asing merupakan jumlah

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Haniffa dan Cooke (2005) menyatakan bahwa adanya kepemilikan asing akan mendorong perusahaan untuk lebih mengungkapkan CSR untuk mendapatkan legitimasi dari pihak eksternal tersebut.

Struktur kepemilikan menjadi salah satu factor yang dipertimbangkan perusahaan dalam pengungkapan CSR karena dapat meningkatkan reputasi dan legitimasi perusahaan (Rustiarini, 2011). Hasil penelitian Alvionita *et al.* (2015) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib sementara Said *et al.* (2009) tidak menemukan pengaruh antara kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR di Malaysia. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H_{5a}: Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.
- H_{5b}: Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum

syariah Malaysia.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh suatu lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Beiner *et al.*, 2003). Menurut Murwaningsih (2009), kepemilikan institusional dapat mendorong tindakan pengawasan yang tinggi terhadap manajemen. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan memengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono, 2005).

Penelitian Utami *et al.* (2012), serta Alvionita *et al.* (2015) menemukan pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela, sehingga diharapkan juga kepemilikan institusional yang besar akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian diatas, maka peneliti menduga bahwa kepemilikan institusional akan berdampak pada pengungkapan ISR. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H_{6a}: Struktur kepemilikan In-

stitusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{6b}: Struktur kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan kriteria menerbitkan laporan tahunan antara 2012 – 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari annual report bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2012-2014.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Analisis data dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* pada setiap item yang mengungkapkan aktivitas sosial pada laporan keuangan bank syariah. apabila terdapat satu item yang diungkapkan maka akan mendapatkan skor "1", dan jika tidak maka akan mendapat skor "0". *ISR score* diukur dengan rumus:

Komponen Indeks ISR mengacu pada komponen indeks ISR AAOIFI yang terdiri dari 76 item dalam 4 kategori.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari enam variable dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 1 Definisi operasional Variabel Independen

Variable independen	Pengukuran
rangkap jabatan DPS	prosentase DPS yang melakukan pengawasan pada lebih dari sama dengan 2 lembaga keuangan dibagi total dewan pengawas syariah
jumlah rapat DPS	Jumlah rapat yang diadakan DPS
jumlah anggota KRN	Jumlah anggota KRN
jumlah rapat KRN	Jumlah rapat yang diadakan KRN
struktur kepemilikan asing	Jumlah saham yang dimiliki pihak asing dibagi dengan total saham yang beredar dikali 100%.
struktur kepemilikan institusional	Jumlah saham yang dimiliki pihak institusi dibagi dengan total saham yang beredar dikali 100%.

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah regresi panel dengan efek acak. Penelitian ini akan menguji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan hipotesis dimana model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ISR Indonesia} = & \alpha + \beta_1 \text{RJDPS} \\ & + \beta_2 \text{JRDPS} + \beta_3 \text{JLKRMN} + \beta_4 \text{JRKRMN} + \beta_5 \text{STKPAS} + \beta_6 \text{STKPIS} + \varepsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ISR Malaysia} = & \alpha + \beta_1 \text{RJDPS} \\ & + \beta_2 \text{JRDPS} + \beta_3 \text{JLKRMN} + \beta_4 \text{JRKRMN} + \beta_5 \text{STKPAS} + \beta_6 \text{STKPIS} + \varepsilon \end{aligned}$$

Dimana:

ISR Indonesia = Pengungkapan ISR di BUS Indonesia

ISR Malaysia = Pengungkapan ISR di BUS Malaysia

α = konstanta

β = koefisien variabel

RJDPS = Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

JRDPS = Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah

JLKRMN = Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

JRKRMN = Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

STKPAS = Struktur Kepemilikan Asing

STKPIS = Struktur Kepemilikan Institusional

ε = residual of error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, bank umum syariah yang ada di Indonesia yang diuji sebanyak 11 bank dan bank syariah di Malaysia sebanyak 13 bank yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* pada laporan tahunan tahun 2012-2014 yang dapat diolah yang ada dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Daftar Bank Syariah yang diteliti

No	Bank Syariah di Indonesia	No	Bank Syariah di Malaysia
1.	Bank BCA Syariah	1.	Affin Islamic Bank
2.	Bank BNI Syariah	2.	Hong Leong Islamic Bank
3.	Bank BRI Syariah	3.	RHB Islamic Bank
4.	Bank BJB Syariah	4.	Bank Islam Malaysia
5.	Bank Syariah Mandiri	5.	Alliance Islamic Bank
6.	Bukopin Syariah	6.	Kuwait Finance House
7.	Maybank Syariah	7.	Ambank Islamic
8.	Bank Muamalat	8.	Public Islamic Bank
9.	Bank Mega Syariah	9.	Maybank Islamic
10.	Bank Victoria Syariah	10.	CIMB Islamic Bank
11.	Bank Panin Syariah	11.	Bank Muamalat Malaysia
		12.	OCBC Al-Amin Bank
		13.	HSBC Amanah Malaysia

Bank umum syariah di Indonesia diuji menggunakan model regresi *Common Effect Model* karena adanya missing data, sementara untuk data bank syariah Malaysia diolah menggunakan *Random Effect Model*. Di bawah ini adalah hasil statistic deskriptif untuk bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.

Tabel 3. Statistics Deskriptif BUS di Indonesia

	ISR_SCORE?	RJBDPS?	JRDPS?	JLKRMN?	JRKRMN?	STKPAS?	STKPIS?
Mean	0.869091	0.863939	14.63636	4.575758	7.575758	0.295455	0.473030
Median	0.920000	1.000000	13.00000	4.000000	4.000000	0.100000	0.470000
Maximum	1.000000	1.000000	30.00000	8.000000	34.00000	0.990000	0.990000
Minimum	0.640000	0.000000	9.000000	3.000000	1.000000	0.000000	0.010000
Std. Dev.	0.112704	0.304435	4.211726	1.414883	7.075620	0.371711	0.450579
Skewness	-1.049225	-2.180967	1.708767	0.852075	2.346205	0.801717	0.082934
Kurtosis	2.869132	6.385469	6.426120	3.062244	8.650152	2.085284	1.160289
Jarque-Bera	6.078347	41.92082	32.19954	3.998501	74.17152	4.685600	4.691568
Probability	0.047874	0.000000	0.000000	0.135437	0.000000	0.096058	0.095772
Sum	28.68000	28.51000	483.0000	151.0000	250.0000	9.750000	15.61000
Sum Sq. Dev.	0.406473	2.965788	567.6364	64.06061	1602.061	4.421418	6.496697
Observations	33	33	33	33	33	33	33
Cross sections	11	11	11	11	11	11	11

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN
PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

Tabel 4. Statistics Deskriptif BUS di Malaysia

	ISR_SCORE?	RJBDPS?	JRDPS?	JLKRMN?	JRKRMN?	STKPAS?	STKPIS?
Mean	0.844103	0.833846	8.743590	6.410256	7.358974	0.407436	0.662308
Median	0.830000	1.000000	7.000000	6.000000	5.000000	0.490000	0.770000
Maximum	1.000000	1.000000	17.00000	12.00000	19.00000	0.990000	0.970000
Minimum	0.710000	0.500000	5.000000	3.000000	1.000000	0.000000	0.240000
Std. Dev.	0.070514	0.219253	3.877859	2.061144	4.579630	0.345906	0.207281
Skewness	0.378509	-0.635335	0.649289	1.262348	0.990886	0.293279	-0.530985
Kurtosis	3.222959	1.570934	2.002802	4.985404	3.230379	1.811632	2.197557
Jarque-Bera	1.012026	5.942352	4.356146	16.76336	6.468306	2.853937	2.879005
Probability	0.602894	0.051243	0.113260	0.000229	0.039394	0.240035	0.237046
Sum	32.92000	32.52000	341.0000	250.0000	287.0000	15.89000	25.83000
Sum Sq. Dev.	0.188944	1.826723	571.4359	161.4359	796.9744	4.546744	1.632692
Observations	39	39	39	39	39	39	39
Cross sections	13	13	13	13	13	13	13

Berdasarkan tabel 3 dan 4 di atas, rata-rata (*mean*) pengungkapan ISR untuk bank syariah Indonesia mencapai 86,91 sementara Malaysia tidak terlalu jauh berbeda dengan nilai 84,41. Untuk jumlah Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (RJBDPS) juga memiliki nilai rata-rata yang tidak terlalu jauh yaitu 86,39% untuk anggota DPS di Indonesia dan Malaysia sekitar 83,36%.. Nilai rata-rata Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JRDPS) di bank syariah Indonesia 14,63 kali sementara di Malaysia lebih rendah sebanyak 8,74 kali. Jumlah rata-rata anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (JLKRMN) di Indonesia sebanyak 4, 57 dengan rata-rata jumlah rapat (JRKRMN) sebanyak sementara

di Malaysia lebih tinggi dengan 6,41 dan rata-rata jumlah rapat 7,35. Struktur Kepemilikan Asing (STKPAS) di Indonesia memiliki rata-rata sekitar 29,55% sementara di Malaysia berkisar 40,74% sementara nilai *mean* Struktur Kepemilikan Institusional (STKPIS) di Indonesia sebesar 47,21% dan di Malaysia memiliki nilai-rata-rata 66,23%.

Untuk uji asumsi klasik, penelitian ini tidak menggunakan uji normalitas dan autokorelasi karena menggunakan data panel. Secara umum, penelitian ini sudah lolos uji asumsi klasik sehingga pengujian hipotesis menggunakan regresi dapat dilakukan. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 4 dan 5 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Regresi Bank Syariah di Indonesia

Dependent Variable: ISR_SCORE?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 04/09/17 Time: 18:11
 Sample: 2012 2014
 Included observations: 3
 Cross-sections included: 11
 Total pool (balanced) observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.234945	0.251277	0.935005	0.3584
RJBDPS?	-0.015756	0.072067	-0.218631	0.8286
LOG(JRDPS?)	0.139000	0.085769	1.620625	0.1172
LOG(JLKRMN?)	0.180367	0.069603	2.591372	0.0155
LOG(JRKRNMN?)	-0.011144	0.031667	-0.351899	0.7278
STKPAS?	0.004507	0.060435	0.074568	0.9411
STKPIS?	0.065106	0.044885	1.450508	0.1589
R-squared	0.325636	Mean dependent var	0.869091	
Adjusted R-squared	0.170013	S.D. dependent var	0.112704	
S.E. of regression	0.102678	Akaike info criterion	-1.528611	
Sum squared resid	0.274111	Schwarz criterion	-1.211170	
Log likelihood	32.22208	Hannan-Quinn criter.	-1.421802	
F-statistic	2.092470	Durbin-Watson stat	0.209955	
Prob(F-statistic)	0.088780			

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dilihat pada nilai adjusted R Square sebesar 0.170013. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen kurang lebih sebesar 17% dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar penelitian. Sementara untuk uji F menunjukkan nilai 0.088780 > nilai sig. 0.05, yang berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi pengungkapan ISR di perbankan syariah Indonesia.

Tabel 6. Hasil Regresi Bank Syariah di Malaysia

Dependent Variable: ISR_SCORE?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/09/17 Time: 19:14
 Sample: 2012 2014
 Included observations: 3
 Cross-sections included: 13
 Total pool (balanced) observations: 39
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.998331	0.119316	8.367092	0.0000
RJBDPS?	-0.138265	0.109778	-1.259494	0.2170
LOG(JRDPS?)	-0.000901	0.002869	-0.313975	0.7556
LOG(JLKRMN?)	-0.006950	0.003763	-1.846783	0.0740
LOG(JRKRMN?)	0.003623	0.001679	2.158070	0.0385
STKPAS?	0.028419	0.068404	0.415463	0.6806
STKPIS?	-0.064271	0.115842	-0.554818	0.5829
Random Effects (Cross)				
AFFIN--C	-0.074744			
HONGLEON--C	0.025970			
RHB--C	0.028750			
BIM--C	0.009765			
ALLIANCE--C	-0.090820			
KFH--C	0.012556			
AMISLAMI--C	-0.012286			
PUBLICBA--C	-0.036021			
CIMB--C	-0.051823			
MAYBANKM--C	0.098511			
MUAMALAT--C	0.131252			
OCBC--C	-0.038147			
HSBC--C	-0.002963			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.085128	0.9987
Idiosyncratic random			0.003012	0.0013
Weighted Statistics				
R-squared	0.237750	Mean dependent var		0.017239
Adjusted R-squared	0.094828	S.D. dependent var		0.003015
S.E. of regression	0.002868	Sum squared resid		0.000263
F-statistic	1.663493	Durbin-Watson stat		1.821210
Prob(F-statistic)	0.162245			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.234275	Mean dependent var		0.844103
Sum squared resid	0.144679	Durbin-Watson stat		0.003314

Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dilihat pada nilai adjusted R Square pada sebesar 0.094828. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen kurang lebih sebesar 9% dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar penelitian. Sementara untuk uji F menunjukkan nilai $0.162245 > \text{nilai sig. } 0.05$, yang berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi pengungkapan ISR di perbankan syariah Malaysia.

Untuk pengujian secara parsial dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Hasil regresi menunjukkan bahwa rangkap jabatan DPS di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang berarti H1a dan H1b ditolak. Hal ini dapat terjadi ketika anggota DPS tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kesesuaian syariah, termasuk dalam hal pengungkapan informasi untuk masyarakat meski merangkap jabatan di organisasi lain. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009, anggota DPS dibolehkan merangkap jabatan pada empat lembaga keuangan

syariahlain. Hal ini menunjukkan bahwa rangkap jabatan DPS memang diperbolehkan.

Tugas Utama DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, dan salah satu tanggung jawab DPS adalah melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap kegiatan bank. Oleh karena itu, sepanjang kegiatan bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, DPS tidak begitu mempersoalkan kualitas dan kuantitas pengungkapan ISR yang lebih condong sebagai tanggung jawab manajemen. Menurut Usamah (2010), model pengawasanyang dilakukan DPS adalah model penasehat semata yang berarti kedudukannya dalam perbankan hanya sebagai tenaga paruh waktu yang datang ke kantor ketika diperlukan. Dengan model ini, DPS cenderung berperan pasif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan ISR, DPS juga hanya sebatas memberi nasehat, tetapi pelaksanaan ditentukan sepenuhnya oleh kebijakan manajemen.

Hasil regresi untuk variabel jumlah rapat DPS di Indonesia dan Malaysia menunjukkan hasil yang sama bahwa jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

pengungkapan ISR sehingga H2a dan H2b ditolak. Seringnya dewan pengawas syariah melakukan pertemuan atau rapat belum tentu berpengaruh pada luas pengungkapan ISR di perbankan. Hal ini bisa terjadi ketika materi rapat DPS lebih banyak berfokus pada tanggung jawab utama DPS sesuai dengan pasal 47 PBI No 11/33/PBI/2009 yaitu (1) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk perbankan, (2) mengawasi proses pengembangan produk baru bank, (3) meminta fatwa kepada DSN terkait produk baru yang belum ada fatwanya, (4) melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syariah dan (5) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari perbankan dalam melaksanakan tugasnya. Dikaitkan dengan profil anggota DPS yang biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat dengan banyak kesibukan, kemudian dibolehkannya rangkap jabatan DPS, tentu mempengaruhi ketersediaan waktu yang dimiliki. Dengan demikian, setiap kali rapat DPS tentu agenda utama adalah pemenuhan kewajiban DPS terhadap bank syariah tempat mereka bertugas sehingga pengungkapan ISR mungkin tidak menjadi prioritas.

Hipotesis 3a yang menyatakan bahwa jumlah

anggota komite remunerasi dan nominasi (KRN) di Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR berhasil diterima. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis bahwa semakin banyak jumlah anggota KRN, evaluasi kinerja manajemen akan semakin tinggi sehingga perbankan berusaha menunjukkan hasil kinerja yang semakin baik, termasuk dari aspek transparansi kegiatan perusahaan dalam bentuk pengungkapan CSR. KRN adalah salah satu komponen dalam mekanisme corporate governance suatu organisasi dan memiliki peran penting dalam hal kebijakan remunerasi karena berkaitan dengan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Sebaliknya H3b yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi di Malaysia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Murwaningsari (2009) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara komite KNR dan kinerja perusahaan. Dilihat dari hasil data statistik deskriptif, rata-rata jumlah anggota KRN di bank syariah Malaysia sebesar 6,4. Jumlah tersebut justru lebih tinggi dari rata-rata anggota KRN di bank syariah Indonesia yang hanya sebesar 4,56 tetapi hasil pengujian statistik menyatakan bahwa

Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani

jumlah anggota KRN BUS di Malaysia tidak mempengaruhi pengungkapan ISR yang dipublikasikan perusahaan. Hal ini kemungkinan terjadi karena beberapa sebab, pertama, kurangnya koordinasi antar anggota. Ketika jumlah anggota cukup banyak tetapi jarang berkoordinasi, tentu mempengaruhi rekomendasi yang dapat diberikan kepada manajemen, termasuk masukan tentang pengungkapan ISR. Appiah dan Chizema (2015) menyatakan sedikitnya jumlah anggota suatu komite justru akan dapat mendorong keefektifan koordinasi komite tersebut.

Kedua, kondisi komite remunerasi dan nominasi yang mempunyai rangkap jabatan juga perlu diperhatikan. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 35, anggota KRN sedikitnya terdiri dari dua orang komisaris independen dan satu pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Sementara pasal 38 menyatakan bahwa anggota KRN dapat merangkap jabatan pada satu komite lainnya pada BUS yang sama. Kondisi ini diduga dapat menjadi benturan aktivitas sehingga tidak semua anggota KRN dapat berpartisipasi aktif dalam tugasnya.

Hasil regresi variabel jumlah rapat komite remunerasi

dan nominasi di Indonesia menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR sehingga H4a ditolak. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) dan Supriyono *et al.* (2014) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Banyak sedikitnya rapat yang dilakukan oleh komite remunerasi dan nominasi, belum tentu berpengaruh pada kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan ISR dengan lebih baik. Hal ini mungkin tergantung pada kualitas rapat yang dijalankan ataupun isi agenda rapat, bukan pada kuantitasnya. Bahkan mungkin rapat yang diadakan oleh KRN bisa saja sekedar menjadi pemenuhan kewajiban (Appiah dan Chizema, 2015).

Tidak berpengaruhnya jumlah rapat KRN terhadap pengungkapan ISR dapat ditelaah dari fungsi dan tanggung jawab KRN itu sendiri ataupun. Tugas KRN terkait dengan kebijakan remunerasi adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, sementara kebijakan

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

nomominasi terkait dengan penentuan prosedur pemilihan dan rekomendasi calon dewan direksi, dewan komisaris dan DPS. Kinerja keuangan dan strategi jangka panjang BUS menjadi factor yang harus diperhatikan oleh KRN ini. Oleh karena itu, meskipun mungkin jumlah rapat anggota KRN banyak atau sedikit, tetapi agenda diskusi akan lebih focus pada kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi kebijakan renumerasi bank syariah, sementara kegiatan yang lain diserahkan sepenuhnya pada kebijakan manajemen, termasuk pengungkapan ISR.

Hasil sebaliknya di Malaysia menunjukkan bahwa jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi (JRKRMN) berpengaruh terhadap pengungkapan ISR sehingga H4b diterima. Meskipun hasil rata-rata JRKRMN hampir sama antara Indonesia (7,575758) dan Malaysia (7,35897), tetapi kualitas rapat mungkin berbeda sehingga di Malaysia semakin banyak jumlah rapat KRMN, maka tingkat pengawasan juga semakin tinggi sehingga berpengaruh pada tingkat pengungkapan ISR bank syariah yang semakin luas. Menurut Appiah dan Chizema (2015), rapat yang dilakukan komite tetap akan menjadi sarana monitoring yang efektif dan mendorong keterlibatan

anggota komite independen untuk terlibat lebih jauh dalam kegiatan perusahaan.

Hasil regresi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan asing di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR sehingga H4a dan H4b ditolak. Melihat hasil statistik deskriptif pada tabel 1 bahwa nilai rata-rata untuk struktur kepemilikan asing di Indonesia hanya 29,55%, sementara di Malaysia sekitar 40,74%, maka saham yang dimiliki pihak asing hanya sedikit sehingga tidak mempengaruhi luas pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Said et.al (2009) di Malaysia dan Yuliawati dan Sukirman (2015) di Indonesia yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Meskipun demikian, hal ini merupakan indikasi yang baik karena pengungkapan CSR seharusnya diinisiasi oleh kesadaran pihak internal perusahaan untuk menunjukkan transparansi kegiatan perusahaan terhadap stakeholder termasuk shareholders. Salah satu faktor pendorong untuk mengungkapkan CSR adalah memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga keberadaan kepemilikan

asing diduga tidak begitu mempengaruhi perbankan syariah. Apalagi bank syariah masih tergolong baru dan begitu banyak mendapat perhatian masyarakat untuk mengetahui apakah memang berbeda dengan bank konvensional sehingga bank syariah akan berusaha memberikan kinerja yang baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.

H6a dan H6b juga ditolak setelah hasil regresi menunjukkan nilai sig $0,139 > 0,05$ untuk Indonesia dan nilai sig $0,886 > 0,05$ untuk Malaysia sehingga disimpulkan bahwa struktur kepemilikan institusional di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rustiarini (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham institusional diduga masih belum efektif dalam memonitoring tingkat pengungkapan, hal ini juga mungkin terjadi karena kepemilikan institusi di perbankan syariah Indonesia dan Malaysia belum begitu mempertimbangkan luas pengungkapan CSR atau ISR sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga mereka tidak terlalu menekan perbankan syariah untuk mengungkapkan ISR

secara detail di dalam laporan tahunan. *Shareholder* mungkin akan lebih focus pada bidang keuangan dalam menilai kinerja perbankan dan menjadikannya sebagai indikator utama. Apalagi masih banyak pihak yang sering membandingkan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini akan membuat bank syariah tidak begitu mendapat tekanan dalam hal pengungkapan ISR, sehingga pengungkapan CSR kembali lagi kepada kebijakan manajemen bank syariah.

K E S I M P U L A N , KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas, dapat disimpulkan bahwa: (1) jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi di Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, (2) jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi di Malaysia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, (3) rangkap jabatan DPS di Indonesia dan Malaysia, jumlah rapat DPS di Indonesia dan Malaysia, jumlah komite remunerasi dan nominasi di Malaysia, jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi di Indonesia, struktur kepemilikan asing di Indonesia dan Malaysia dan struktur kepemilikan

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

institusional di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Tidak berpengaruhnya beberapa faktor di atas dapat dipandang positif sebagai bentuk tanggung jawab perbankan syariah untuk selalu memberikan informasi dalam bentuk pengungkapan ISR. Kewajiban untuk memberikan informasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh elemen-elemen mekanisme *corporate governance*, tetapi juga timbul dari kesadaran pihak manajemen bahwa sumber daya yang dikelola adalah amanah dari Allah SWT sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada yang utama Allah SWT dan juga stakeholder.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: (1) hanya menggunakan variabel dari proksi mekanisme *corporate governance*, (2) Penelitian ini hanya membandingkan dua negara Indonesia dan Malaysia, (3) Jangka waktu pengambilan sampel relatif pendek hanya 3 tahun dari tahun 2012 - 2014, Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah: (1) Menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian, (2) dapat menggunakan variabel yang lebih luas, tidak saja dari proksi GCG tetapi juga komponen lain seperti factor kinerja,

factor eksternal perbankan dan lainnya, dan (3) penelitian selanjutnya diharapkan bisa membandingkan dengan negara lain yang masih serumpun (studi komparatif).

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI). (2009). *Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI)*. Manama, Bahrain. <http://www.aoifi.com/acstandard.html>.
- Adiertanto, C. P., and Chariri, A. (2013). "Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi kasus pada Bank Syariah di Asia)", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2 (1), 168-182.
- Alvionita, Intan, dan Taqwa S. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*. *Makalah Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Appiah, K. O., dan Chizema, A. (2015). Remuneration Committee and Corporate Failure. *Corporate Governance*. Vol. 15(5), 623-640.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 33/ PBI/ 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah". Retrieved on 20 October 2015, from www.ojk.go.id
- Beiner, S., W. Drobetz, F. Schmid dan H. Zimmermann. (2003). *Is Board Size An Independent Corporate Governance Mechanism?*. <http://www.wuz.unibas.ch/cofi/publications/papers/2003/06.03.pdf>. Diakses tanggal 30 Juli 2016.
- Boediono, G.S.B. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.
- Bukair, A., A dan Rahman, A, R. (2015). The Effect of the Board of Directors' Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. *Journal of Management Research*, Vol. 7 (2), 506-519.

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN
PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

- El-Halaby, S., dan Hussainey, K. (2015). The Determinants of Social Accountability Disclosure: Evidence from Islamic Banks around the World. *International Journal of Business*, Vol. 20 (3), 202-223.
- Farook, S., Hasan, M.K & Lanis, R. (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: the Case of Islamic Bank. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2 (2), 114-161.
- Finance Committee on Corporate Governance, 2001, "Malaysian Code on Corporate Governance", Securities Commission.
- Fitria, S. dan Hartanti, D. (2010). Islam dan Tanggung Jawab Social: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiatives Index dan Islamic Social Reporting Indeks. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Guthrie, J. dan Parker, L., D. (1989). Corporate Social Reporting: A rebuttal of Legitimacy Theory. *Accounting and Business Research*, Vol.19 (76), 343-352.
- Hafiz, R. M., Adriani A., dan Chairina, (2015). Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Medan.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Mohd Nazli, dan Pramono, S. (2003). Alternative Disclosure and Performance measures for Islamic Banks. Retrieved on 2 February 2016, from www.iiium.edu.my.
- Haniffa, R.M. dan Cooke, T.E. (2005). The Impact of Culture and Corporate Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24, 391-430.
- IAEI. (2009). "Perkembangan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Dalam Menghadapi MEA 2015", *Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam*, diakses tanggal 29 Juni, 2016. <http://www.bi.go.id>,

Peni Nugraheni, Rahma Dwi Yuliani

- Kholid dan Bachtiar. (2015). "Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqasid Syariah* Bank Syariah di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Moir, L. (2001). What Do We Mean by Corporate Social Responsibility. *Corporate Governance*, Vol.1(1), 16-22.
- Murwaningsari, E. (2009). Hubungan *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibilities* dan *Corporate Financial Performance* Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11(1), 1-30.
- Nugraheni, Peni dan Anuar, H. Azlan. (2014). Implications Of Shariah On The Voluntary Disclosure Of Indonesian Listed Companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 12 (1), 77-98.
- Rahayu, R. S., dan Cahyati, A. D. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perbankan Syariah. *Jurnal F. Ekonomi: Jrak*, 5(02).
- Rahman, R.A., dan Saimi, N.S. (2015). Determinants of Ethical Identity Disclosure among Malaysian and Bahrain Islamic Banks. In *H A El-Karanshawy et al (Eds). Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance*. Doha, Qatar: Bloomabury Qatar Foundation.
- Rustiarini, N. W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 6 (1), 1-24.
- Said, R., Zainuddin Y, Hj, Haron H. (2009). The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal*. Vol. 5(2), 212-226,
- Supriyono, Edi, Mustaqim A. B., dan Suhardjanto D. (2014). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Mataram.

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN
PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING

Usamah. (2010). Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Masters Thesis, Universitas Diponegoro.

Utami, W. D., Suhardjanto D., dan Triatmoko S. (2012). Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.

Widyani, I.P. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. *Thesis*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

www.ojk.com

www.bnm.gov.my

Yuliawati, R., dan Sukirman, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*". *Accounting Analysis Journal* Vol. 4 (4), 1-9.